



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PADA ACARA PEMBUKAAN RAKOR PPIHD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Hari/Tgl : Senin / 9 Juni 2008

Pukul : 19.30 WIB

Tempat : Grand Function Room Hotel Gajah Mada
Jn. Gajah Mada, Pontianak

- Yth. Sdr. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau atau yang mewakili;
- Yth. Sdr. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Kepulauan Riau;
- Yth. Ketua Komisi D DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
- Yth. Bupati/Walikota se-Kalimantan Barat;
- Yth. Kepala Kanwil Depaartemen Agama Provinsi Kalimantan Barat;
- Yth. Ketua PPIHD Provinsi Kalimantan Barat beserta anggota;
- Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat;
- Yth. Para Hadirin, Peserta dan Undangan yang berbahagia.

Selamat malam dan salam sejahtera.

Mengawali sambutan ini, sebagai umat beragama, marilah kita haturkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan nikmat kesehatan, kita dapat hadir pada Acara Ekspose Embarkasi Batam, yang dirangkaikan dengan Pembukaan Rapat Koordinasi, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan ucapan selamat datang, kepada Rombongan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, bersama dengan Tim Ekspose Embarkasi Haji Batam, dimana telah berkenan hadir dan akan memberikan informasi, tentang program-program yang akan dilakukan, pada musim Haji 1429 H/2008 M, sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada calon/jama'ah haji Di Embarkasi Batam.

Semoga kehadiran rombongan ini, dapat memberikan masukan, informasi-informasi yang berharga, untuk selanjutnya dapat pula dijadikan pembahasan/acuan dalam Rakor PPIHD Provinsi Kalimantan Barat. Demikian juga kepada seluruh peserta baik dari kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, karena telah berkenan meluangkan waktunya, untuk hadir dan mengikuti acara ini.

Hadirin yang saya hormati.

Penyelenggaraan ibadah haji, adalah merupakan tugas nasional, dan menjadi tanggung jawab Pemerintah. Hal ini telah diamanatkan di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Penyelenggaraan ibadah haji, mempunyai tujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya, melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik, agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan nyaman, sesuai dengan tuntutan agama, sehingga para jama'ah haji dapat melaksanakan ibadah secara mandiri, dan menjadi haji yang mabrur.

Berkenaan dengan tujuan penyelenggaraan haji, maka pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, memiliki tanggung jawab terhadap kelancaran, ketertiban dan keamanan penyelenggaraan ibadah haji di daerah. Oleh karena itu, gubernur selaku koordinator di tingkat provinsi, mempunyai peran dan fungsi, dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan ibadah haji, dengan para bupati dan walikota, selaku Koordinator penyelenggaraan haji di Kabupaten Kota.

Untuk itu, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, telah menetapkan Keputusan Gubernur Nomor 396 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD) Provinsi Kalimantan Barat. Upaya ini dilakukan, dalam rangka mempersiapkan dan meningkatkan pelayanan terhadap calon/jama'ah haji di Kalimantan Barat.

Mengingat urgensi dan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik, kepada Calon/Jama'ah Haji Kalimantan Barat, maka untuk itu perlu dilaksanakan Rakor PPIHD se-Kalimantan Barat, dan menjadi sangat berarti, karena di sinergikan dengan ekspose Embarkasi Batam, sehingga PPIHD kabupaten/kota dapat menerima informasi langsung dan pihak yang berkompeten di bidangnya di mana selama ini hanya menerima informasi dan PPIHD Provinsi Kalimantan Barat atau Kakanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Barat.

Hadirin yang saya hormati.

Mengingat beratnya beban yang diemban oleh PPIHD dalam rangka menyelenggarakan Ibadah Haji, tentunya koordinasi antara PPIHD, dengan jajaran Departemen Agama di Provinsi Kalimantan Barat, yang merupakan perpanjangan tangan dari Departemen Agama RI, harus terus menerus dibangun. Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Barat, selaku Instansi terkait yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan haji yang menyangkut pendaftaran, pembuatan paspor dan lain-lain, dituntut lebih profesional, bertanggung jawab, penuh kejujuran adil dan jauh dari unsur KKN, dalam mengelola keberangkatan dan pemulangan calon/jama'ah haji tersebut.

Sementara PPIHD yang bertugas mempersiapkan rencana kegiatan pelayanan dan perlindungan calon/jama'ah haji, sekaligus mengkoordinasikan dengan instansi terkait, dalam menyelenggarakan pemberangkatan dan pemulangan calon/jama'ah haji Pontianak-Batam dan sebaliknya, dimana di antara anggota PPIHD tersebut juga terdapat aparat Kanwil Depaetemen Agama Provinsi Kalimantan Barat, tentunya dapat lebih memberikan informasi, dan kerjasama yang baik, dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada calon/jama'ah haji.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang patut kita cermati bersama, yaitu:

1. Dalam mewujudkan penyelenggaraan haji yang optimal, serta untuk memberikan kemudahan para calon haji, antara Jajaran Departemen Agama, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pihak-pihak lain, dapat lebih ditingkatkan, terutama dalam kedudukan PPIHD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Masing-masing komponen pelayanan penyelenggaraan ibadah haji, tentunya dituntut peran dan fungsi secara profesional. Jajaran Departemen Agama sebagai penyelenggara haji, secara operasional merupakan ujung tombak pelayanan haji, yang terkoordinasi secara nasional. Sedangkan Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah, telah ditetapkan sebagai koordinator penyelenggara ibadah haji daerah, demikian halnya dengan Bupati/Walikota. Sebagai Kepala Daerah, sangat berkepentingan dan bertanggung jawab, terhadap pelayanan bagi masyarakatnya. Sementara unsur-unsur lain seperti aparat keamanan, jasa transportasi, dan sebagainya, juga tidak kalah pentingnya.

Oleh karena itu, ekspose embarkasi Batam yang menyampaikan informasi-informasi pelayanan haji, hendaknya dapat dijadikan bahan masukan, dalam PPIHD Provinsi Kalimantan Barat bekerja, khususnya terhadap aspek-aspek peningkatan pelayanan kepada calon/jama'ah haji di Kalimantan Barat. Untuk itu sekali lagi saya minta agar semua pihak dapat bekerjasama, sebagaimana diamanatkan oleh Pemerintah.

2. Berkaitan dengan meningkatnya permohonan calon jemaah haji beberapa Kabupaten, bahkan mengajukan permohonan penambahan quota secara resmi, sesuai dengan persentase penduduk Islam Kalimantan Barat, hendaknya dapat menjadi perhatian kita bersama. Sejalan dengan itu, di samping terus mengupayakan penambahan quota haji Kalimantan Barat oleh Kanwil Departemen Agama, sebaiknya quota untuk masing-masing Kabupaten/Kota perlu dievaluasi, mengingat komposisi jumlah penduduk yang beragama Islam, pada masing-masing daerah mungkin saja sudah mengalami perubahan.

Di lain pihak, berdasarkan laporan yang masuk, bahwa pada musim haji 1428 H/2007 M, masih terdapat calon jama'ah haji dari daerah lain, yang terdaftar sebagai jema'ah haji Kalimantan Barat. Hal tersebut tentunya semakin mengurangi kesempatan masyarakat Kalimantan Barat, untuk melaksanakan ibadah haji.

Untuk itu saya harapkan di masa yang akan datang, dapat lebih ditertibkan, bilamana perlu administrasi kependudukan calon jema'ah haji lebih diperketat.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten/Kota, diharapkan dapat turut memonitor dan menertibkan warganya yang terdaftar sebagai calon jema'ah haji, berdasarkan quota masing-masing Kabupaten/Kota.

3. Agar penyelenggaraan haji yang akan datang menjadi lebih baik, hendaknya segala sesuatunya dapat dipersiapkan secara lebih awal. Hal-hal yang perlu lebih diperhatikan antara lain, masalah mekanisme pembayaran, baik Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) maupun biaya lokal. Terutama mengingat telah terjadinya kenaikan BBM secara nasional, yang tentunya berdampak kepada BPIH maupun biaya lokal. Oleh karena itu, hendaknya hal tersebut dapat diinformasikan secara jelas dan transparan sejak dini. Sehingga dapat dimaklumi oleh calon/jama'ah haji di Kalimantan Barat.
4. Selanjutnya masalah manasik haji, hendaknya dapat dikoordinasikan dan disosialisasikan secara lebih awal, sehingga calon/jama'ah haji dapat lebih siap menunaikan ibadah haji. Koordinasi mengenai manasik Haji dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, hendaknya makin diintensifkan. Hal-hal yang perlu diketahui, hendaknya sedini mungkin disampaikan saat manasik haji tersebut.

Hadirin yang saya hormati,

Demikianlah hal-hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, akhirnya "dengan nama Tuhan Yang Maha Kuasa" acara Rapat Koordinasi PPIHD Provinsi Kalimantan Barat, dengan resmi saya nyatakan di buka. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua. Amien Terima kasih. Selamat malam dan salam sejahtera.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT



Drs. CORNELIS, MH